

PRESS RELEASE

Bawaslu KBB Kawal Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II 2025

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, Selasa (2/7).

Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaeman menyampaikan bahwa rapat pleno menjadi wadah untuk memastikan akurasi dan keterbukaan data pemilih melalui partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

KPU menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud komitmen KPU untuk menjaga keterbukaan informasi serta akurasi data pemilih. Kami membuka ruang kolaborasi dari berbagai pihak agar validitas data terus terjaga. Setiap masukan dari instansi terkait akan kami tindak lanjuti pada pelaksanaan PDPB di triwulan berikutnya.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/PL.02.1-BA/3217/2025, ditetapkan jumlah pemilih berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1.327.156 orang, terdiri atas 670.688 pemilih laki-laki dan 656.468 pemilih perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 17.433 pemilih dibandingkan data Triwulan I, yang mencatat total 1.309.723 pemilih (661.657 laki-laki dan 648.066 perempuan). Kenaikan tersebut terdiri atas penambahan 9.031 pemilih laki-laki dan 8.402 pemilih perempuan.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan rapat pleno ini sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap lonjakan data pemilih baru. Bawaslu meminta penjelasan rinci terkait sumber data, terutama terhadap kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pemilih baru hasil pencermatan. Validitas data merupakan fondasi utama dalam menjamin hak konstitusional warga. Karena itu, Bawaslu secara konsisten memastikan setiap data yang dimutakhirkan oleh KPU diperbarui secara transparan dan akurat setiap triwulan.

Menanggapi hal tersebut, pihak KPU menjelaskan bahwa data pemilih TMS diperoleh melalui transfer data dari KPU RI, sedangkan pemilih baru merupakan hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Selain Bawaslu, rapat pleno turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan daerah, antara lain perwakilan KODIM 0609/Cimahi, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas

Sosial Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran para pihak tersebut memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan data pemilih yang valid, mutakhir, dan partisipatif.

Dengan terlaksananya rapat pleno ini, diharapkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat melalui pembaruan data pemilih yang akurat, transparan, dan inklusif.

Narasumber:

Ridwan Raharja

Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Bandung Barat, 2 Juli 2025

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat